

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahap-tahap kegiatan pembangunan daerah yang melibatkan semua unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada, dan hal tersebut secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini mengatur lingkup dan tingkatan perencanaan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja-SKPD), hal ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap Kepala SKPD harus menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman atau arahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah yang disusun sebagai penjabaran Renstra OPD dan Memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pendanaan beberapa tahun ke depan. Benang merah Rencana Kerja OPD sebagai tindaklanjuti Rencana Startegis OPD adalah bagaimana mendorong pembangunan kota Bima dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Saat ini, wilayah operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dalam penanganan sampah mencapai 35 Kelurahan dari 41 kelurahan yang ada di kota Bima. Salah satu hal yang menjadi kendala adalah keterbatasan jumlah armada operasional. Belum lagi umur armada operasional tersebut sebagian sudah lebih dari 15 tahun. Sementara itu, lokasi taman yang ada di Kota Bima saat ini meliputi 53 lokasi. Akan tetapi, dengan total luasan keseluruhan taman 349,2 hektar untuk wilayah kota Bima, tentu saja ruang terbuka hijau yang berupa taman kota masih perlu ditambah lagi

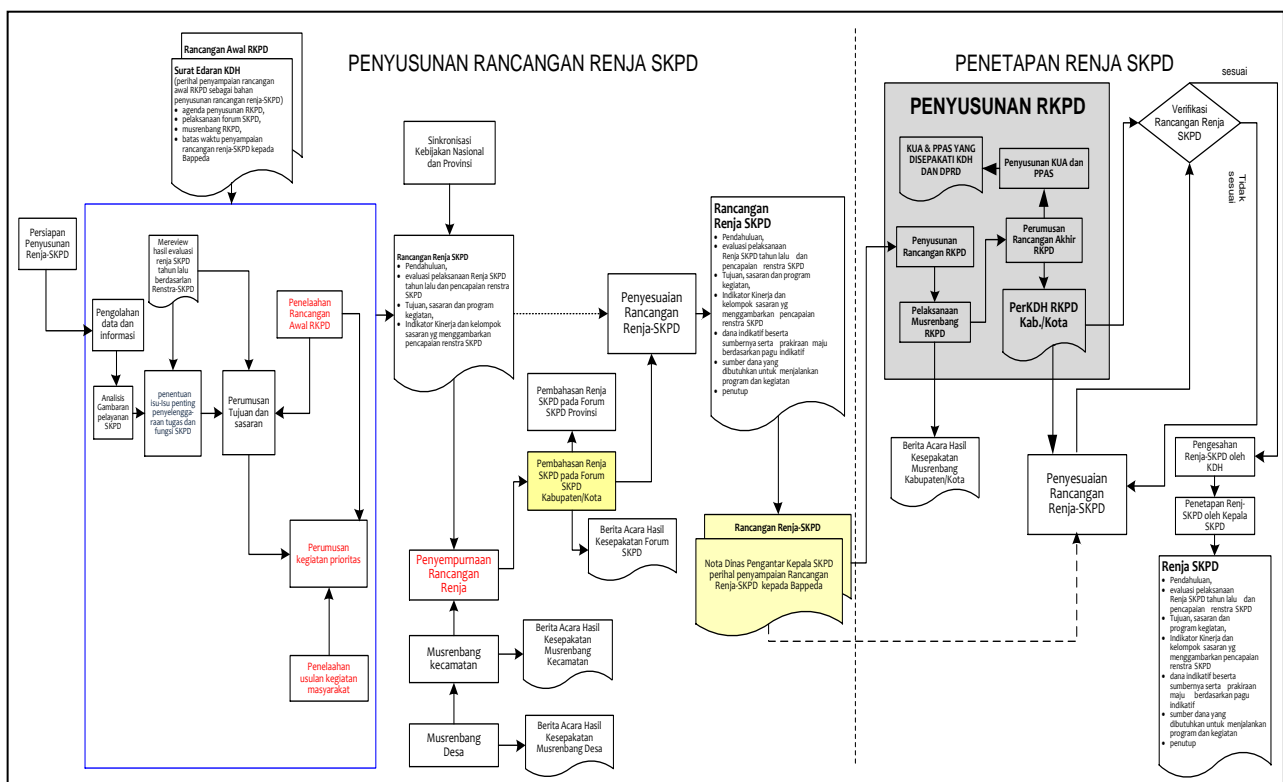
jumlahnya guna mendukung estetika kota. Untuk pemakaman rakyat yang terkelola / telah ditata sampai dengan tahun 2021 sudah mencapai 55,68 hektar atau 89 lokasi pemakaman rakyat yang ada di kota Bima.

Rencana Kerja (Renja) ini berisi berbagai program dan kegiatan pembangunan baik kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin (belanja tidak langsung) maupun kegiatan-kegiatan pembangunan (belanja langsung).

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DLH Kota Bima ini semuanya bermuara pada upaya peningkatan pelayanan baik pelayanan intern dalam rangka pengembangan organisasi maupun pelayanan kepada seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima yakni **“Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup”**

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini:

Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2022 mengacu pada beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan dan pedoman penyusunan seperti sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
 19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88);
 20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
 21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 103);

22. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019);
23. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
24. Peraturan Walikota Bima Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 257).
25. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 233);
26. Peraturan Walikota Bima nomor 84 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima tahun anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2020 nomor 631).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program serta kegiatan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadaan yang diharapkan dalam kurun waktu 1 tahun (jangka pendek) dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup. Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima Tahun 2022 dimaksudkan untuk :

- a. Menjabarkan Visi, Misi dan Program yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima Tahun 2018-2023
- b. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2022
- c. Sebagai sarana dalam menampung aspirasi masing-masing bidang untuk penyusunan program dan kegiatan Tahunan DLH Kota Bima.
- d. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kota Bima.

Penyusunan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2022 bertujuan untuk mensinkronkan dan mensinergikan dinamika dan aspirasi yang berkembang di masyarakat, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam hal ini

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Kegiatan SKPD Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan sasaran dan program pembangunan Walikota Bima yang akan dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan.

Dokumen RKPD Kota Bima Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Memuat Evaluasi pelaksanaan renja dan capaiannya, pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2022, serta analisis kinerja pelayanan daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2020 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB V PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Untuk mencapai sasaran pembangunan daerah Kota Bima tahun 2022 yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2020 yang telah di sepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

- Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima merupakan implementasi dari perjanjian kinerja yang telah ditandatangani yang diukur mulai dari Capaian Kinerja Tujuan, Capaian Kinerja Sasaran, Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja kegiatan.
- Untuk mewujudkan Tujuan yang ingin dicapai, Dinas Lingkungan hidup telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis, dengan dukungan capaian program dan kegiatan antara lain:
 1. Capaian Strategis I, yaitu meningkatnya layanan Persampahan
Terwujudnya capaian kinerja sasaran strategis Peningkatan layanan persampahan, sangat ditentukan oleh keberhasilan capaian Kinerja Program. Adapun Program yang mendukung keberhasilan Capaian Kinerja Sasaran Strategis tersebut adalah “**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**”. Untuk mengetahui Capaian Kinerja Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, diukur berdasarkan persentase sampah yang terangkut dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Dalam mendukung program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan didukung tiga kegiatan, yaitu:

a. *Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan*

Untuk meningkatkan pelayanan persampahan se-Kota Bima, sangat diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. Untuk dimaklumi bahwa jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dalam keadaan baik sebanyak 30 unit, sedangkan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 42 unit.

b. *Pemeliharaan kendaraan operasional pengangkutan sampah*

Untuk meningkatkan pelayanan persampahan se-Kota Bima, sangat diperlukan kendaraan operasional dalam keadaan baik, untuk itu perlu dilakukan upaya pemeliharaan secara terus menerus sehingga kendaraan operasional tersebut tetap dapat melaksanakan pengangkutan sampah sesuai dengan SOP yang ditetapkan.

c. *Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan*

Dalam meningkatkan layanan persampahan selain melalui peningkatan sarana dan prasara persampahan diperlukan pula adanya peran serta dan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kelompok masyarakat dan bank sampah. Upaya peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup memiliki yaitu pelatihan dan Pokmas serta Bank sampah

2. *Capaian Strategis II yaitu, Terwujudnya RTH Publik sesuai dengan Ketentuan.*

Capaian Kinerja Terwujudnya Ruang Terbuka Hijau Publik diukur dengan Luas Ruang terbuka Hijau Publik Yang tersedia dibandingkan dengan Target Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan. Pada tahun 2020, Kota Bima memiliki Rung terbuka Hijau seluas 62,99 Ha, terdiri dari Taman Kota, area Pemakamnan, dan Hutan Kota, serta kawasan Terbuka Hijau Publik Lainnya

Dalam mendukung tercapainya ruang terbuka hijau publik didukung oleh 2 program, yaitu ; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan dan Program Pengelolaan areal pemakaman, dengan 4 kegiatan, yaitu;

- a. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pertamanan. Pada tahun 2020 ada 44 Taman yang tertata, sedangkan target yang ditetapkan adalah 49 taman, sehingga Capaian kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pertamanan.

b. Pengelolaan Area Pertamanan

Pengelolaan Areal Pemakaman diukur berdasarkan indikator Kinerja Program (outcome) yaitu: Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman dan Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Pada tahun 2020 ada 21 makam yang di yang tertata (pembangunan pagar kuburan), sedangkan target yang ditetapkan adalah 25 makam

d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Pada tahun 2020 ada. makam yang di yang sudah dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarananya (penyediaan sound sistem dll), sedangkan target yang ditetapkan adalah 6 makam

3. **Capaian Strategis III, Meningkatnya kualitas SDA dan LH**

Untuk mengetahui Capaian Sasaran Strategis ***Meningkatnya Kualitas SDA dan LH***, diukur berdasarkan persentase perbandingan antara Kawasan SDA yang di rehabilitasi dengan Kawasan SDA yang rusak/kritis. Ada 3 (Tiga) Kawasan SDA yang mempengaruhi Kualitas SDA dan LH, yaitu Kawasan Mata Air, Kawasan Mangrove dan Kawasan Terumbu Karang Terwujudnya capaian kinerja sasaran, sangat ditentukan oleh keberhasilan capaian Kinerja Program. Terdapat 3 (tiga) Program yang mendukung keberhasilan Capaian Kinerja Sasaran Strategis “ **Meningkatnya Kualitas SDA dan LH**”, yaitu;

a. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Air

Untuk mengetahui Capaian Kinerja Program Konservasi Sumber daya air, diukur berdasarkan Prosentase Jumlah mata Air yang terlindungi. Adapun formulasi perhitungannya adalah :

Capaian Kinerja = Mata Air yang dilindungi/ Jumlah Mata Air x 100%

Untuk di maklumi jumlah mata air yang ada di Kota Bima sampai saat ini adalah 29 titik, dengan luas kawasan 160 Ha, 30% dari Luas kawasan tersebut dalam keadaan kritis, atau seluas 48 Ha.

b. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

Untuk mengetahui Capaian Kinerja Program Konservasi Sumber daya alam, diukur berdasarkan Prosentase Konservasi Mangrove dan Terumbu Karang . Adapun formulasi perhitungannya adalah :

Capaian Kinerja = Luas kawasan terkonservasi/ Luas kawasan kritis x 100%. kawasan Mangrove dan terumbu karang yang ada di Kota Bima sampai saat ini adalah 36,7 Ha, dengan Luas kawasan dalam keadaan kritis, seluas 16,39 Ha

c. Program Rehabilitas Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Air

Adapun Kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan Capaian Kinerja Program **Program Rehabilitas Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Air** adalah Kegiatan/Program Kampung Iklim.

4. **Capaian Strategis IV, Terkendalinya kerusakan dan Pencemaran Lingkungan.**

Terwujudnya capaian sasaran strategis **“Terkendalinya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan”**, sangat ditentukan oleh keberhasilan capaian Kinerja Program. Untuk mengetahui Capaian Kinerja Program Terkendalinya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan, diukur berdasarkan derajat kualitas lingkungan hidup sehingga Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup untuk Program **“Pengendalian Pencemaran Dan Pengrusakan Lingkungan Hidup”** adalah :

a. **Kualitas Air**

Kualitas sumber daya air ditentukan berdasarkan data pengambilan sampel kualitas air sungai yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup pengambilan sampel kualitas air pada tanggal 26 November 2019 di Sungai Sori Padolo, yaitu di bagian tengah kelurahan Paruga Rasane Barat, Sori Bedi (Jembatan Bedi), Jembatan Dam Rontu, Sungai Kodo, dan Sungai Lampe. Nilai indeks pencemaran pada ketiga titik tersebut semuanya tercemar ringan

b. **Kualitas Udara**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima telah melakukan pemantauan kualitas udara ambien dengan Metode Pasive Sampler dengan menempatkan alat pemantau pada 4 (empat) titik perwakilan yaitu, pada daerah transportasi, industri, pemukiman dan perkantoran dengan 2 (dua) kali sampling yaitu bulan Juni dan bulan Agustus. Saat ini data pengambilan sampling menggunakan titik sampling dan pemantauan kualitas udara ambien,

sementara untuk data emisi gas buang belum dilakukan. Udara merupakan suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi. Komposisi campuran gas tersebut tidak selalu konsisten, komponen yang konsentrasinya selalu bervariasi adalah air dalam bentuk uap H²O dan CO₂ jumlah uap air yang terdapat di udara bervariasi tergantung dari cuaca dan suhu.

c. Tutupan Lahan

Lahan merupakan faktor penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya karena dalam kelangsungan hidupnya tidak dapat terlepas dari masalah lahan. Pembangunan sebagai aktivitas manusia yang memberikan tekanan pada lingkungan sangat bergantung pada ketersediaan lahan. Tata guna lahan merupakan salah satu faktor penentu utama dalam pengelolaan lingkungan

Ada 4 (empat) Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan Capaian Kinerja Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Kegiatan Peningkatan koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
Ada 2 (dua) lokasi yaitu Pantai Ama Hami Lawata dan Sungai Padolo. Kegiatan Bersih Pantai dan Sungai telah mengeluarkan timbulan sampah pada 2 (dua) lokasi tersebut sebanyak 600 m³
2. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, merupakan kegiatan pembinaan kepada sekolah sehat melalui kegiatan sekolah adiwiyata.
3. Kegiatan koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura.
Kegiatan Peningkatan penilaian Kota Sehat/Adipura, merupakan kegiatan pelaksanaan lintas sektoral sesuai dengan sasaran dan indikator Adipura, sehingga memerlukan koordinasi antar sektor, antar OPD. Selain itu, dibutuhkan koordinasi dan kerjasama dengan Sekolah, untuk mewujudkan sekolah Adiwiyata.
4. Kegiatan pelaksanaan Pengawasan pelaksanaan kebijakan dibidang LH
Kegiatan Peningkatan pengawasan pelaksanaan kebijakan dibidang LH merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima untuk memastikan apakah kebijakan dibidang

dibidang LH berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, yang meliputi monitoring dan evaluasi, sosialisasi serta penyelesaian konflik lingkungan diluar lembaga peradilan. Lebih detail dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kota Bima

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 11 1 12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	99,80%	100%	99,90%	99,9%	100%		
2 11 1 2.01.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang terkirim	100%	990 lembar	1.000 Lembar	997 lembar	99,7%	1.000 Lembar	2.987 lembar	746,75 lembar
2 11 1 2.01.2	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, air dan listrik tersedia	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	9 bulan
2 11 1 2.01.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	100%	59 kendaraan	59 Kendaraan	59 kendaraan	100%	59 Kendaraan	177 kendaraan	44,25
2 11 1 2.01.4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa administrasi yang terlayani	100%	12 Bulan	12 bulan	12 Bulan	100%	12 bulan	36 bulan	9 bulan
2 11 1 2.01.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase jasa kebersihan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	

2	11	1	2.01.6	Penyediaan Alat Tulis kantor	Persentase Penyediaan alat kantor	100%	100%	100%	100%	100%	300%	75%	
2	11	1	2.01.7	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Persentase penyediaan barang cetak & penggadaan	100%	100%	100%	100%	100%	300%	75%	
2	11	1	2.02	Penyediaan Komponen Instansi listrik	Persentase penyediaan	100%	100%	100%	100%	100%	300%	75%	
2	11	1	2.02.1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	100%	19 unit	19 unit	19 unit	100%	19 unit	57 Unit	14,25 unit
2	11		12.02.3	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan tersedia	100%	7 media	7 media	7 media	100%	7 media	21 media	5,25 media
2	11		12.02.5	Penyediaan makan dan minum	Jumlah penyediaan makan dan minum	100%	900 kali	800 Kali	800 kali	100%	800 Kali	2.500 kali	625 kali
2	11		12.02.7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	100%	56 kali	48 kali	46 kali	96%	48 kali	150 kali	37,5 kali
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100%	80 kali	72 kali	68 kali	94,4%	72 kali	220 kali	55 kali
2	11		12.06	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan Prasarana terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	75%
2	11		12.06.1	Pemeliharaan rutin gedung kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	100%	1 gedung	1 Gedung	1 gedung	100%	1 Gedung	3 gedumg	0,75 gedung
2	11		12.06.2	Pemeliharaan rutin kendaraan	Jumlah kendaraan terpelihara	100%	59 kendaraan	59 kendaraan	59 kendaraan	100%	59 kendaraan	177 kendaraan	44,25 kendaraan
2	11		12.06.5	Pemeliharaan rutin peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor terpelihara	100%	22 peralatan kantor	22 Pealatan kantor	22 peralatan kantor	100%	22 Peralatan kantor	66 peralatan kantor	16,5

2	11	12.06.9	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian dan keuangan	Persentase Laporan tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	300%	75%	
2	11	12.08	Penyusunan Laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen tersedia	100%	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	0,75 dokumen
2	11	12.08.1	Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun	Jumlah laporan Keuangan tersedia	100%	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	0,75 dokumen
2	11	12.08.2	Penyusunan Renja kerja tahunan	Jumlah Dokumen Renja	100%	3 dokumen	3 Dokumen	3 dokumen	100%	3 Dokumen	9 dokumen	2,25 dokumen
2	11	12.08.3	Penyusunan Lakip, LPJ dan LPPD	Jumlah Dokumen	100%	3 dokumen	3 Dokumen	3 dokumen	100%	3 Dokumen	9 dokumen	2,25 dokumen
2	11	12.08.4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	- Persentase Sampah yang tertangani - Persentase Pengurangan sampah	- 72%	- 57%	- 62%	- 64,5%	- 104,03%	- 65%	- 186,5%	- 46,63%
						- 5%	- 15%	- 6,9%	- 46%	- 15%	- 26,9%	- 6,73%
2	11	12.09	Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan berfungsi	50 Dump truck, 12 Ambroll dan 10 Pick Up	24 Dump truck, 5 Ambroll dan 2 Pick	30 Dump truck, 9 Ambroll dan 3 Pick	23 Dump truck, 5 Ambroll dan 2 Pick	95,83%	39 Dump truck, 10 Ambroll dan 4 Pick Up	86 Dump truck, 20 Ambroll dan 8 Pick	21,5 Dump truck, 2,5 Ambroll dan 2 Pick up
2	11	12.09.1	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Volume sampah yang tertangani	372 M3	179,33 M3	216 M3	322 M3	149,07%	240 M3	741,33 M3	185,333
2	11	12.09.2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah kelompok Bank sampah yang dibina	10 klp	5 Kelompok	10 Kelompok	2 kelompok	20%	10 kelompok	17 Kelompok	4,25 klp
2	11	12.09.6	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan LH	% meningkatnya kualitas air dan Udara	85%	76,97%	78%	78,98%	101,25%	80%	235,95%	58,99%
2	11	12.09.9	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah kriteria yang sudah dipenuhi Sehat/Adipura	90%	71%	80%	71%	88,75%	83%	225%	56,25%

2	11	12.09.10	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup kebijakan bidang lingkungan hidup	15 Izin	20 izin	25 Izin	20 Izin	80%	25 izin	65 izin	16,25 izin
2	11	22.01	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	Panjang sungai dan pantai yang ditangani Prokasih/Superkasih	3 Lokasi (250 meter)	250 meter	250 meter	225 Meter	90%	0	475 meter	118,75 meter
2	11	22.01.1	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	Jumlah Perwali	3 Dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	1,5 dokumen
2	11	22.02	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	MENINGKATNYA LUAS LAHAN YANG DIKONSERVASI	86%	34%	52%	20%	38,46%	69%	123%	30,75%
2	11	22.02.1	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Sumber Air	Luas lahan yang dikonservasi	125 Ha	5 ha	15 ha	2 ha	13,33%	47 ha	54 ha	13,5 ha
2	11	22.02.2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah Kelompok perlindungan mata air	25 kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	4 Kelompok	80%	10 Kelompok	19 kelompok	4,75 klp
2	11	3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASEE MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN LH								
2	11	3	2.01 Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah data informasi lingkungan informasi	tidak ada							
2	11	3	2.01 Program Peningkatan Pengendalian Polusi	% Kualitas Udara dan Tanah	80%	80%	80%	81,356%	101,69%	82%	243,356%	60.84%
2	11	3	2.01 Pengujian emisi/polusi Udara akibat aktivitas industri	Jumlah Pengujian emisi/polusi udara	20 Sampel	20 Sampel	30 sampel	25 sampel	83,33%	30 sampel	75 sampel	18,75 sampep
2	11	3	2.01 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan	3 Kali	3 kali	3 kali	3 kali	100%	3 kali	9 kali	2,25 kali

2	11	3	2.02	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	PERSENTASE AREAPEMAKAMAN YANG TERTATA	100%	69%	69%	69%	100%	79%	217%	54,25%
2	11	3	2.02	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Panjang pagar kuburan	920	1.949 Meter	64 meter	560 Meter	875%	74 meter	2.583 meter	645,75 meter
2	11	3	2.02	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah sarana dan prasarana pemakaman dalam kondisi baik	92 makan	35 makam	40 makam	56 makam	140%	56 makam	147 makam	36,75 makam
2	11	3	2.03	PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANA PERTAMANAN	PERSENTASE TAMANKOTA YANG TERTANGANI	100%	70,97%	79,03%	79,03%	100%	87,19%	229,13%	57,28%
2	11	3	2.03	Pemeliharaan rutin/berkalasarana dan prasarana pertamanan	Jumlah taman yang dipelihara dengan baik	62 Taman	44 taman	49 taman	44 taman	89,80	54 taman	142 taman	35,5 taman
2	11	3	2.03	Pembangunan sarana dan prasarana pertamanan	Luas taman yang dibangun	287 ha	267,2 ha	272 ha	267,5 ha	98,35%	277 ha	811,7 ha	202,93 ha

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2020 masih diperoleh dasar hasil pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan oleh nomenkaltur Dinas Lingkungan Hidup dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Dinas Lingkungan Hidup. Dalam bab ini dibahas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja DLH.

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa akan datang. Dan secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat *performance* masing-masing bidang yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh. Untuk mengetahui capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dapat dilihat sebagai berikut:

Berdasarkan tabel dibawah ini, dapat dilihat bahwa terdapat 4 (empat) indikator kinerja sasaran DLH yang mendukung indikator kinerja utama yaitu indeks kualitas air, dan udara dengan tingkat pencemaran sedang, persentase luas RTH publik dan persentase kawasan direhabilitasi. Pencapaian 4 (empat) indikator sasaran pada tahun 2020, hanya satu indikator sasaran yang menunjukkan hasil yang memenuhi target yaitu indeks kualitas udara dengan capaian kinerja 81,36 dengan target 79,5 sementara 3 (tiga) indikator sasaran tidak mencapai target, yaitu indikator sasaran indeks kualitas air, persentase luas RTH Publik dan persentase luas Kawasan direhabilitasi. Kurang terpenuhinya Pencapaian target ini dipengaruhi oleh minimnya anggaran rehabilitasi yang di targetkan 24,69 Ha, hanya tersedia anggaran 8 Ha, disamping itu kecilnya tingkat keberhasilan pada kegiatan penanaman pada daerah sekitar mata air yang kurang maksimal, hal ini terjadi banyaknya lahan di sekitar mata air mengalami kerusakan akibat pembakaran lahan, disamping itu juga kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hutan sangat minim.

2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Bima

No	Indikator Sasaran	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022)	Tahun 2023	
1	Indeks Kualitas Air			4	3,5	3	2	4,04		4	3,8	
2	Indeks Kualitas Udara			79,5	80	82	85	81,36	85,35	81,50	82	
3	% Luas RTH Publik			11,01	11,01	11,34	11,64	11,21		11,50	12	

4	% Luas Kawasan direhabilitasi			2	2	2,2	2,5	0,64	0,64	1	2		
---	-------------------------------	--	--	---	---	-----	-----	------	------	---	---	--	--

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dan efektif dalam mengantisipasi serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan/kegiatan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan Identifikasi baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengembangan program bidang lingkungan meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang dihadapi adapun isu-isu penting dalam penyelenggara tugas dan fungsi, antara lain:

A. permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya UPT Laboratorium menyebabkan operasional laboratorium tidak dapat maksimal;
2. Tidak adanya peralatan dan personil analis laboratorium sehingga menghambat operasional laboratorium;
3. Terbatasnya jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) sehingga masalah penanganan kasus lingkungan kurang maksimal;
4. Masih minimnya peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pengendalian;
5. Belum adanya peta inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar untuk mengetahui potensi sumber pencemar;
6. Minimnya Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.
7. Alih fungsi lahan terbuka (open space) menjadi lahan terbangun
9. Kemerossotan keanekaragaman hayati akibat eksploitasi dan pemanfaatan secara berlebihan;
10. Dampak penipisan lapisan ozon, pemanasan global dan perubahan iklim yang berpotensi menyebabkan bencana lingkungan;
11. Meningkatnya degradasi dan kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan, pertanian dan perkebunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan;
12. Perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah masih relatif rendah;
13. Rendahnya peran serta masyarakat dalam melaksanakan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

B. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*)

C. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD;

Ada beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam meningkatkan pelayanan

- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pengujian kualitas lingkungan hidup.
- Belum tersedianya laboratorium lingkungan hidup
- Kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang berkualitas ramah masih rendah
- Masih kurangnya sosialisasi PERDA Lingkungan Hidup
- Kewenangan Pemerintah Kab/Kota dalam penanganan Hutan beralih pada provinsi
- Lemahnya koordinasi antar pemerintah provinsi dengan Kab/Kota dan antar sektor dalam penanganan Hutan
- Kurangnya sarana dan prasarana persampahan.
- Perubahan fungsi ekosistem menjadi fungsi yang lain.
- Masih minimnya pemahaman mengelola bank sampah di tingkat masyarakat
- Minimnya anggaran sosialisasi pentingnya Bank sampah dan PERDA persampahan untuk mengurangi limbah dan sampah.

Sedangkan peluang adalah sebagai berikut;

- Besarnya political will dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas dari Pemerintah
- Tingginya etos kerja Pegawai DLH dalam mewujudkan semangat kerja untuk lingkungan berkualitas dan ramah.
- Adanya komitmen bersama masyarakat pasca banjir bahwa mewujudkan lingkungan yang berkualitas dan ramah mutlak harus dilakukan agar banjir tidak terjadi lagi.

D. Ada isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, yang berkaitan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk merupakan dua hal yang paling berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Aktifitas pembangunan dan pemenuhan kebutuhan manusia telah menurunkan potensi sumber daya alam dan meningkatkan jumlah limbah yang mengakibatkan lingkungan akan tercemar. Kedua hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap menurunnya kualitas lingkungan. Menurunnya kualitas lingkungan ini semakin diperparah dengan terjadinya pemanasan global.

Demikian pula yang terjadi di Kota Bima, cukup banyak aspek yang ikut mempengaruhi kualitas lingkungan baik lokal maupun global, isu-isu penting tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terjadinya pemanasan global yang berpengaruh terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatnya kegiatan usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar;
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan pengelolaan lingkungan Hidup;
4. Menurunnya potensi sumber daya air (sumber mata air, air tanah dan air permukaan) akibat eksploitasi yang berlebihan dan pencemaran lingkungan;
5. Penanganan air limbah rumah tangga/domestik belum dilakukan secara terpadu dan optimal;
6. Masih rendahnya penerapan 3R dalam pengelolaan sampah rumah tangga;
7. Keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna semakin terancam keberadaannya;
8. Meningkatnya degradasi dan kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan, pertanian dan perkebunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan
9. Masih minimnya keterlibatan masyarakat dan swasta dalam melakukan pengelolaan lingkungan;
10. Masih minimnya regulasi terkait pengelolaan lingkungan hidup;
11. Masih rendahnya penegakan hukum lingkungan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Ada beberapa Program dan kegiatan yang anggarannya berubah pada Rancangan awal RKPD awal ke Rancangan akhir RKPD, yaitu antara lain:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dari anggaran sebesar Rp 388.897.864 menjadi 226.000.000 pada rancangan RKPD akhir.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ada kenaikan dari RKPD rancangan awal ke Rancangan akhir, kenaikan tersebut berasal dari kenaikan kegiatan pengelolaan Laboratorium.
3. Program Keanekaragaman Hayati (kehati) turun dari Rancangan RKPD awal dari 3.811.817.176 menjadi 3.452.862.390 pada Rancangan RKPD akhir. Penurunan ini diakibatkan pada penurunan usulan pokir dewan.
4. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat naik dari 41.459.790 Rancangan Awal RKPD menjadi 140.750.000 pada Rancangan Ahit'

5. Program Pengelolaan Persampahan naik dari 3.021.072.773 Rancangan RKPD awala menjadi 3.646.183.580 pada Rancangan RKPD ahir, ini terlihat pada tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokune Prerencanaan	3 Dokumen	6,203,991	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra	3 Dokumen	8,150,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	2,931,244	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	4,200,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan. RKA SKPD	1 Dokumen	1,878,273	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	6,220,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1,878,273	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan. RKA	1 Dokumen	4,180,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1,878,273	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	4,176,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan kinerja perangkat daerah	4 Laporan	2,458,830	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan kinerja perangkat daerah	4 Laporan	4,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan	3,824,846	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan	4,020,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10,001,061,454	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10,446,480,515	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	jumlah ASN mendapatkan penatausahaan	1 tahun	9,896,693,875	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	jumlah ASN mendapatkan penatausahaan	1 tahun	10,289,380,515	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	cakupan pelaksanaan	100 persen	100,800,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	cakupan pelaksanaan	100 persen	147,600,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan keuangan	1 Laporan	2,447,446	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan keuangan	1 Laporan	4,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	4 laporan	1,120,133	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	4 laporan	5,500,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				441,267,244	Administrasi Umum Perangkat Daerah				237,856,022	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bima	jumlah komponen listrik dalam kondisi baik	1 kegiatan	8,250,625	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bima	jumlah komponen listrik dalam kondisi baik	1 kegiatan	8,250,625	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100 Persen	14,605,397	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100 Persen	14,605,397	
	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Kota Bima	jumlah bahan yang dicetak dan	65.0000 lembar	18,411,222	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Kota Bima	jumlah bahan yang dicetak dan	65.0000 lembar	15,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah SSPD	66 kali	400,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah SSPD	66 kali	200,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				372,282,56	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				342,282,561	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	jumlah surat yang terkirim	1.000 lembar	131,989,268	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	jumlah surat yang terkirim	1.000 lembar	131,989,268	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	jumlah jasa komunikasi,	12 bulan	45,861,518	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	jumlah jasa komunikasi	12 bulan	45,861,518	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	jumlah penyediaan jasa peralatan	1 kegiatan	23,981,590	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	jumlah penyediaan jasa peralatan	1 kegiatan	23,981,590	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bima	cakupan pemenuhan ATK	100 Persen	170,450,185	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bima	cakupan pemenuhan ATK	100 Persen	140,450,185	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				334,583,889	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				286,583,889	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima	jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai	50 kendaraan	153,624,588	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima	jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai	50 kendaraan	120,624,588	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bima	cakupan layanan perpajakan kendaraan	50 kendaraan	153,624,588	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bima	cakupan layanan perpajakan kendaraan	50 kendaraan	140,500,273	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah Pemeliharaan	50 kendaraan	155,500,27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah Pemeliharaan	50 kendaraan	8,548,986	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima	jumlah gedung, kantor yang terpelihara	1 Bangunan	8,548,986	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima	jumlah gedung, kantor yang terpelihara	1 Bangunan	8,470,337	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bima	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang	1 Banguna	8,470,337	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bima	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang	1 Banguna	8,439,705	
	Penataan Organisasi				20,000,000	Penataan Organisasi				0	
	eningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				20,000,000	eningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Bima			0	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Menurunya Pelanggaran	60	388,897,864	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		ersentase Menurunya Pelanggaran te		226,000,000	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Kota Bima	Jumlah Dokumen RPPLH Tata Ruang	1 Dokumen	200,000,000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Kota Bima	Jumlah KLHS Tata Ruang	1 Dokumen	126,000,000	
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten	Kota Bima	Jumlah dokumen RPPLH	1 dokumen	200,000,000	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten	Kota Bima	Jumlah KLHS RPJMD	1 dokumen	126,000,000	
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				188,897,864	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				100,000,000	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kota Bima	Jumlah Dokumen KLHS	1 Dokumen	188,897,864	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kota Bima		1 Dokumen	100,000,000	

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kota Bima	Jumlah Dokumen KLHS	1 Dokumen	0	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kota Bima			0	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Indeks Kualitas Air dan Udara	82%	330,236,620	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				348,141,632	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Bima	jumlah kordinasi titik pencenaran	10 titik	35,304,03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Bima	jumlah kordinasi titik pencenaran	10 titik	20,000,000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Bima	Jumlah kelurahan Kampung iklim	3 Kelurahan	77,924,767	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Bima	Jumlah kelurahan Kampung iklim	3 Kelurahan	86,196,451	
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Bima	Pengujian sample Yang Dilakukan terhadap Media	19 titik	26,000,000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Bima	Pengujian sample Yang Dilakukan terhadap Media	19 titik	143,800,000	
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				117,212,194	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				68,145,181	
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Bima	Jumlah Bentuk Media (sarana) Penyampaian Informasi	2 dokumen	38,145,181	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Bima	Jumlah Bentuk Media (sarana) Penyampaian Informasi	3 kali	38,145,181	
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Bima	sosialisasi		79,067,013	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Bima	sosialisasi	5 Kali		
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				73,795,626	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				30,000,000	

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Kota Bima	Jumlah Pantai yang dibersihkan	3 kali	20,663,659	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Kota Bima	Jumlah Pantai yang dibersihkan	3 kali	30,000,000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Bima	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan rehabilitasi		53,131,967	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Bima	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan rehabilitasi		0	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase Luas RTH Publik	11,34%	3,811,817,176	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase Luas RTH Publik		3,453,862,79	
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Bima	Jumlah Dokumen rencana penetapan pengelolaan kehati	2 Dokumen	14,396,137	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Bima	Jumlah Dokumen rencana penetapan pengelolaan kehati	2 Dokumen	14,396,137	
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kota Bima	Jumlah Taman KEHATI yang dikelola	24 taman	51,652,712	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kota Bima	Jumlah Taman KEHATI yang dikelola	24 taman	63,236,250	
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota Bima	Luas RTH Publik Yang ditangani	24 makam	3,745,768,327	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota Bima	Luas RTH Publik Yang ditangani	10 makam	3,376,230,405	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase Meningkatnya Jumlah Ijin Lingkungan yang diawasi	60%	49,068,169	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase Meningkatnya Jumlah Ijin Lingkungan yang diawasi		40,000,000	
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Bima	Jumlah Izin Lingkungan yang diterbitkan	500 izin	49,068,169	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Bima	Jumlah Izin Lingkungan yang diterbitkan	500 izin	40,000,000	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase Meningkatnya Jumlah Pokmas sadar Lingkungan	100	41,459,799	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		ersentase Meningkatnya Jumlah Pokmas sadar Lingkungan		140,750,000	

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bima	Jumlah Pokmas Peduli Lingkungan	3 kelompok	41,459,799	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bima	Jumlah Pokmas Peduli Lingkungan	3 kelompok	140,750,000	
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Bima	Jumlah Pokmas/lembaga	3 kelompok	0	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Bima	Jumlah Pokmas/lembaga	3 kelompok	0	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase meningkatnya penghargaan bidang lingkungan	100	36,610,793	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				36,610,793	
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bima	Jumlah Pokmas/Lembaga yang dinilai	3 lembaga	36,610,793	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bima	Jumlah Pokmas/Lembaga yang dinilai	3 lembaga	36,610,793	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				14,467,285	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Bima			14,467,285	
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten	Kota Bima	jumlah Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	10 kasus	14,467,285	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten	Kota Bima	jumlah Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	10 kasus	14,467,285	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase sampah yang tertangani		3,021,072,773	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				3,646,183,500	
Pengelolaan Sampah	Kota Bima	Persentase		3,021,072,773	Pengelolaan Sampah	Kota Bima			3,646,183,500	
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bima	volume sampah yang terangkut ke TPA	228 ton	2,826,947,299	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bima	volume sampah yang terangkut ke TPA	228 ton	3,480,990,500	

Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Bima	Jumlah pokmas pengelola sampah	3 kelompok	56,333,741	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Bima	Jumlah pokmas pengelola sampah	6 kelompok	110,000,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kota Bima	Jumlah Koordinasi	10 kali	137,791,733	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kota Bima	Jumlah Koordinasi	10 kali	55,193,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada musrenbang 2022 yang dilakukan, baik pada tingkat kelurahan maupun pada tingkat kecamatan ada beberapa usulan masyarakat yang dilakukan verifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup, yaitu usulan Paganisasi Kuburan TPU Tolobali sepanjang 400 meter, usulan pengadaan container dan usulan Pengadaan mesin daur ulang sampah. Dari tiga usulan tersebut hanya satu usulan yang diterima, yaitu usulan pagarnisasi TPU Tolobali, sementara usulan container dimasukkan pada kegiatan pendanaan pada Kelurahan dan usulan untuk pengadaan mesin daur ulang diteruskan pada musrenbang tingkat kelurahan, sementara ada delapan usulan lewat pokir dewan, yaitu 6 untuk paganisasi kuburan, 1 untuk bak sampah dan 1 untuk pemeliharaan taman.

Tabel 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kota Bima
Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Paganisasi Kuburan	TPU Tolo Bali	Panjang Pagar kuburan	400 meter	
2	Pengadaan Container	Kel. Lampe	Jumlah Pengadaan Kontainer	1 Unit	
3	Pengadaan Mesin Daur Ulang Sampah	TPA	Jumlah Peralatan	1 unit mesin daur ulang dan 3 unit motor roda tiga	
4	Paganisasi Kuburan	TPU Manggemaci	Panjang Pagar Kuburan	100 Meter	
5	Pemeliharaan taman Doro Parapimpin	Pane	Jumlah Taman Yang dipelihara	1Taman	
6	Paganisasi Kuburan	TPU Kumbe	Panjang Pagar Kuburan	200 Meter	
7	Paganisasi Kuburan	TPU Kendo	Panjang Pagar Kuburan	300 Meter	
8	Paganisasi Kuburan	TPU Suhada	Panjang Pagar Kuburan	250 Meter	
9	Pengadaan Bak Sampah	Lewi Rato	Jumlah Bak Sampah	300 buah	
10	Penerangan Listrik Untuk Kuburan	TPU Tolo Bali	Jumlah Lampu	15 Buah	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Untuk mempelajari Faktor penghambat dan pendorong Perangkat Daerah yang akan mempengaruhi pencapaian Visi Misi Kepala Daerah adalah dengan mengetahui sebab-sebab yang melatari penghambat dan pendorong perangkat daerah perlu menelaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi. Dalam menelaah tersebut perlu mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendorong, maka perangkat daerah bisa mengambil kebijakan untuk mengatasi faktor penghambat perangkat daerah tersebut. Untuk lebih jelas faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah

Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Menjaga kualitas Lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya Kualitas dan kuantitas SDM dalam pengujian kualitas lingkungan hidup - Belum tersedianya laboratorium lingkungan hidup - Kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang berkualitas ramah masih rendah - Masih kurangnya sosialisasi PERDA Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada tenaga teknis/ahli dalam pengujian kualitas lingkungan - Tidak adanya ASN yang berminat sebagai tenaga fungsional penyidik lingkungan. - Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan seperti pencemaran lingkungan dengan membuang sampah di sungai - Penerapan PERDA lingkungan belum dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Besarnya political will dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas dari Pemerintah - Tingginya etos kerja Pegawai DLH dalam mewujudkan semangat kerja untuk lingkungan berkualitas dan ramah - Tersedianya lahan untuk pembangunan Laboratorium - Kebijakan relokasi masyarakat disempadan sungai.

2	<p>Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya kewenangan Pemerintah Kab/Kota dalam penanganan Hutan - Lemahnya koordinasi antar pemerintah propinsi dengan Kab/Kota dan antar sektor dalam penanganan Hutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi ladang - Lemahnya penegakan hukum bagi pelaku Ilegal logging (Perusak Hutan) - Lahan mata air disekitar dikuasai oleh masyarakat dengan memiliki hak milik 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan pemerintah Kota untuk melestarikan hutan, khususnya dalam perlindungan mata air sangat besar - Adanya kelompok penyelamat mata air (kelompok masyarakat) untuk melindungi kawasan hutan di sekitar mata air - Adanya kesadaran masyarakat untuk mempertahankan Dan melindungi hutan, khususnya disekitar kawasan hutan.
3	<p>Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pencemaran dan kerusakan lingkungan - Rusaknya habitat yang ada - Adanya pembudidayaan spesies tertentu - Polusi zat-zat kimia - Erosi tanah - Pencagaran yang tidak berjalan lancar - Perubahan fungsi ekosistem menjadi fungsi yang lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya erosi tanah sehingga kedalaman air sunga/laut semakin berkurang. yang menyebabkan luas sungai/laut semakin berkurang - Adaptasi ekosistembaru pada habitat yang baru - Pertambahan jumlah penduduk - Kurangnya kesadaranpemahaman, kepedulian masyarakat untuk menjaga keanekaragaman hayati - Penegakan hukum yang lemah 	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin berkembangnya a agrowisata yang mendorong masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan - Mulai dibentuknya

4	Terwujudnya pengelolaan persampahan berbasis masyarakat menuju Indonesia bebas sampah tahun 2024 melalui akses layanan 70% dan pengurangan 30%	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sarana dan prasarana - Kurangnya SDM - Belum Optimal dalam mengelola bank sampah - Kurangnya sosialisasi pentingnya Bank sampah dan PERDA persampahan untuk mengurangi limbah dan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dalam meminimalkan sampah - Penerapan PERDA sanksi kepada pelaku pembuang sampah sembarangan belum terjadi - Terbatasnya tempat untuk dijadikan TPS 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya regulasi tentang pemberdayaan masyarakat terhadap pengangkutan sampah - Kebijakan optimalisasi bank sampah disetiap kelurahan ada bank sampah - Munculnya Komunitas Peduli sampah
---	--	---	---	--

Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra OPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran jangka Menengah Renstra OPD Propinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Tertanganinya lahan kritis di dalam dan di luar			
2	Terpeliharanya sumberdaya air baik secara vegetatif maupun sipil teknis; eksport;	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan fungsi ekosistem menjadi fungsi yang lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran pemahaman, kepedulian masyarakat untuk menjaga keanekaragaman hayati - Penegakan hukum yang lemah 	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan mendaur ulang limbah - Adanya pencagaran dengan mengembangkan kelompok permata di sejumlah mata air.
3	Tersedianya data potensi dan produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;			

4	Berkurangnya dampak negatif pembuangan sampah oleh masyarakat melalui upaya pengolahan sampah secara mandiri;	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sarana dan prasarana - Kurangnya SDM -Belum Optimal dalam mengelola bank sampah - Kurangnya sosialisasi pentingnya Bank sampah dan PERDA persampahan untuk mengurangi limbah dan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dalam meminimalkan sampah -Penerapan PERDA sanksi kepada pelaku pembuang sampah sembarangan belum terjadi -Terbatasnya tempat untuk dijadikan TPS 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya regulasi tentang pemberdayaan masyarakat terhadap pengangkutan sampah - Kebijakan optimalisasi bank sampah disetiap kelurahan ada bank sampah - Munculnya Komunitas Peduli sampah
5	Terpantaunya kualitas udara dan air secara kontinu sebagai indikator lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Pencemaran dan kerusakan lingkungan - Rusaknya habitat yang ada - Adanya pembudidaya spesies tertentu - Polusi zat-zat kimia - Erosi tanah - Pencagaran yang tidak berjalan lancar - Perubahan fungsi ekosistem menjadi fungsi yang ain 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya erosi tanah sehingga kedalaman air sungai/laut semakin berkurang. Yang menyebabkan luas sungai/laut semakin berkurang. - Adaptasi ekosistem baru pada habitat yang baru - Pertambahan jumlah penduduk - Kurangnya kesadaran pemahaman, kepedulian masyarakat untuk menjaga keanekaragaman hayati - Penegakan hukum yang lemah 	<ul style="list-style-type: none"> - semakin berkembangnya agrowisata yang mendorong masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan - Mulai dibentuknya eco-green dan eco industri dimana limbah yang ada bisa dikurangi dengan mendaur ulang limbah - Adanya pencagaran dengan mengembangkan kelompok permata di sejumlah mata air.

6	Terpantaunya aktifitas perusahaan yang berdampak terhadap kondisi lingkungan hidup Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi NTB dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi NTB	- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pengujian kualitas lingkungan hidup - Belum tersedianya laboratorium lingkungan hidup Kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan	- Tidak ada tenaga teknis/ahli dalam pengujian kualitas lingkungan - Tidak adanya ASN yang berminat sebagai tenaga fungsional penyidik lingkungan - Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan seperti pencemaran	- Besarnya political will dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas dari Pemerintah Tingginya etos kerja Pegawai DLH dalam mewujudkan semangat kerja untuk lingkungan berkualitas dan ramah
7	Terlaksananya diklat teknis bagi aparatur sesuai dengan kebutuhan tenaga di lapangan	- Tidak adanya ASN yang berminat sebagai tenaga fungsional penyidik lingkungan	- Kurangnya Tim teknis/ahli untuk pengujian laboratorium untuk pemantauan perusakan lingkungan (air, Udar dan tanah)	- Pengiriman ASN untuk mengikuti tugas belajar/Diklat
8	Tersedianya sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan di lapangan	- Kurangnya sarana dan prasarana operasional	- Kurangnya sarana dan prasarana operasional	- Adanya penambahan armada untuk peningkatan operasional sesuai dengan kebutuhan di lapangan

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup menjabarkan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dipaparkan sebagai berikut ini:

1. Persen cakupan kawasan bebas sampah
2. Persen RTH Publik
3. Persen Kawasan direhabilitasi
4. Derajat Kualitas Air, udara dan Tanah

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD diatas dijelaskan kembali dengan proyeksi target untuk lima tahun kedepan sebagaimana dalam tabel 3.2 tentang Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dibawah ini.

Guna pencapaian sasaran tingkat daerah, maka ditetapkan 5 (lima) Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dalam mendukung sasaran daerah, yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas layanan kebersihan dan pengelolaan persampahan lingkungan perkotaan;
- 2) Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup serta Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- 3) Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan;
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH yang estetis, fungsional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan Kawasan perkotaan
- 5) Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima merupakan implementasi dari perjanjian kinerja yang telah ditandatangani yang diukur mulai dari Capaian Kinerja Tujuan, Capaian Kinerja Sasaran, Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja kegiatan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dinas lingkungan hidup didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Renstra antara lain;

a. Prioritas dan Sasaran perangkat daerah

Perioritas dan sasaran Perangkat Daerah mengacu kepada program prioritas pembangunan daerah yang didasarkan pada renstra perangkat daerah pada tabel dibawah ini;

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator sasaran daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator sasaran PD (outcome)
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air dan Udara	Meningkatnya Layanan Persampahan	Persentase Cakupan kawasan bebas sampah
2	Program Pengelolaan Areal Pemakaman			Terwujud nya RTH Publik sesuai ketentuan	Persentase Luas RTH Publik
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan				
4	Program Perlindungan Dan Konservasi SDA		Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi	Terkendalinya kerusakan dan pencemaran lingkungan	Persentase Kualitas air, udara dan tanah
5	Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup				
6	Program Peningkatan Kualitas dan Akses				

	Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			Meningkatnya kualitas SDA dan LH	Persentase Kawasan Yang direhabilitas
7	Program Peningkatan Pengendalian Polusi				

b. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima telah menetapkan Tujuan dan Sasaran Pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2018-2023. Indikator Tujuan dan Sasaran ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima. Penjelasan tentang Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2022 sebagaimana tersaji pada tabel berikut;

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran PD

No	Tujuan dan Sasaran PD		Indikator tujuan dan Sasaran PD	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran
	Tujuan:	Sasaran:		
1	Peningkatkan kualitas pelayanan persampahan	Meningkatnya Layanan Persampahan	Persentase Cakupan kawasan bebas sampah	70%
2	Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Terwujud nya RTH Publik sesuai ketentuan	Persentase Luas RTH Publik	50%
3	Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Terkendalinya kerusakan dan pencemaran lingkungan	Derajat kualitas air, udara dan tanah	82%
4	Peningkatan Kualitas SDA dan Linhkungan Hidup	Meningkatnya kualitas SDA dan LH	Persentase Kawasan direhabilitasi	90%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

4.1 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

Urusan Lingkungan Hidup di Pemerintah Kota Bima merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh berbagai instansi sektor dan dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan mempertahankan daya dukung dan daya tampungnya. Kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan prasyarat bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Seiring dengan Visi Pembangunan Pemerintah Kota Bima yang akan dicapai selama lima tahun mendatang yaitu: **“Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Lingkungan Perkotaan Yang Bersih, Nyaman dan Asri Sesuai Tata Ruang”**.

Salah satu pemaknaan kota yang maju adalah kota yang memiliki masyarakat dengan derajat kesehatannya tinggi dan angka harapan hidup tinggi serta tergambar pada misi yang keempat yaitu memantapkan infrastruktur sarana dan prasarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.

Dalam Misi tersebut, kebijakan diarahkan untuk melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan. Hal ini secara jelas mengisyaratkan adanya keinginan untuk tetap menyeimbangkan antara upaya eksplorasi sumber daya alam demi pembangunan dengan kepentingan menjaga lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi diupayakan untuk diperbaiki, melalui berbagai kebijakan seperti : rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai, dan pengembangan energi dan transportasi yang ramah lingkungan, dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Untuk meningkatkan Kualitas Lingkungan, dapat dicapai melalui 4 (empat) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatkan Layanan persampahan,
2. Terwujudnya Ruang Terbuka Hijau Publik sesuai ketentuan
3. Meningkatnya Kualitas SDA dan Lingkungan Hidup
4. Terkendalinya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

Tabel 4.1

Sasaran dan Program/Kegiatan

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan
1	Meningkatkan Layanan Persampahan	<p>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan tiga pelaksanaan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan - Pemeliharaan kendaraan operasional pengangkutan sampah - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
2	Terwujudnya Ruang Terwujud Hijau Publik sesuai ketentuan	<p>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
3	Meningkatnya Kualitas SDA dan Lingkungan Hidup	<p>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota <p>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</p> <p>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4	Terkendalinya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	<p>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.2 Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggung jawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2019-2023, pada misi ke-4 RPJMD Kota Bima yaitu, **Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana;**

Dalam misi ke 4 RPJMD Kota Bima tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima selama kurun waktu lima tahun kedepan adalah meningkatkan kualitas dan daya dukung lingkungan dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Target capaian indikator sasaran ini ditetapkan dengan mengacu pada target IKLH Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN sampai dengan akhir periode tahun 2022 sebesar 68,50%. Kondisi kinerja pada awal periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sebesar 40,25%. Target capaian mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 berturut-turut disesuaikan dengan target nasional yaitu sebesar 59,78%, 65,02% dan 68,50%. Sedangkan target untuk tahun 2022 sampai dengan akhir periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima ditetapkan sesuai dengan dengan nilai akhir target nasional yaitu sebesar 68,50%.

Guna pencapaian sasaran tingkat daerah, maka ditetapkan 5 (lima) Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dalam mendukung sasaran daerah, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas layanan kebersihan dan pengelolaan persampahan lingkungan perkotaan;
2. Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup serta Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

3. Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH yang estetis, fungsional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan Kawasan perkotaan
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk mendukung lima indikator kinerja utama maka dituangkan dalam tujuh prioritas pembangunan, sesuai dengan tabel di bawah ini;

Tabel 4.2

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kota Bima

No	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Ket
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, DIDUKUNG TIGA KEGIATAN; 1. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA 2. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 3. enyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampaha	3,646,183,500	
2	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	900.0000.000	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	2.552.862.792	
4	Program Perlindungan Dan Konservasi SDA	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	326,000,000	

5	Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	<p>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 	152.612.366	
6	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<p>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 	178.895.181	
7	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	109.982.345	

4.3.Rencana Progran dan Kegiatan Pada Tahun Anggaran 2022.

Pada tahun 2022 mumauat 9 program dan 46 kegiatan seperti termuat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
2	1				Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup								
2	1	1	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan evaluasi			34,946,000				
2	1	1	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	8,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	8,394,500
2	1	1	2.0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kota Bima	1 Dokumen	4,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	4,320,000
2	1	1	2.0	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Kota Bima	1 Dokumen	6,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6,406,600

						Dokumen Perubahan DPA- SKPD						
2	1 1	1	2.0 1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Kota Bima	1 Dokumen	4,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4,305,400
2	1 1	1	2.0 1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Kota Bima	1 Dokumen	4,176,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4,301,280
2	1 1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	4 laporan	4,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 laporan	4,120,000

2	1 1	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	2 laporan	4,020,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 laporan	4,140,000
2	1 1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan			10,446,480,515			10,446,750,515
2	1 1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	1 tahun	10,289,380,515	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 tahun	10,289,380,515
2	1 1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	100 persen	147,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	147,600,000
2	1 1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	1 laporan	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 laporan	4,120,000
2	1 1	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Kota Bima	4 laporan	5,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 laporan	5,650,000

						Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD						
2	1 1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan jasa Administarasi Umum Perangkat			237,856,022			244,663,541
2	1 1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bima	1 kegiatan	8,250,625	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 kegiatan	8,498,144
2	1 1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bima	100 persen	14,605,397	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	14,715,397
2	1 1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bima	650000 lembar	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	650000 lembar	15,450,000
2	1 1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	66 kali	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70 kali	206,000,000

2	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jumlah Koordinasi dan konsultasi SKPD			342,282,561				352,371,590
2	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	1000 lembar	131,989,268	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1000 lembar	135,948,946
2	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bima	12 bulan	45,861,518	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	47,237,363
2	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bima	100 persen	23,981,590	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	24,521,590
2	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bima	1 kegiatan	140,450,185	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	144,663,691
2	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang milik Daerah			286,583,889				295,181,406

2	1	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bima	50 kendaraan	120,624,588	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 kendaraan	124,243,326
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bima	50 kendaraan	140,500,273	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 kendaraan	144,715,281
2	1	1	2.0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bima	50 kendaraan	8,548,986	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 kendaraan	8,805,456
2	1	1	2.0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bima	1 bangunan	8,470,337	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 bangunan	8,724,447
2	1	1	2.0	#	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bima	1 bangunan	8,439,705	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 bangunan	8,692,896

						bilitasi							
2	1 1	2				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Menurunnya Pelanggaran Terhadap RPPLH		60%	226,000,000			232,780,000
2	1 1	2	2.0 1			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Bidang Lingkungan yang Disusun			126,000,000			129,780,000
2	1 1	2	2.0 1	1		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Kota Bima	1 dokumen	126,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 dokumen	129,780,000
2	1 1	2	2.0 2			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah KLHS yang disusun	1	Dokumen	100,000,000		1 dokumen	103,000,000
2	1 1	2	2.0 2	1		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Kota Bima	1 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	103,000,000
2	1 1	2	2.0 2	2		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Kota Bima	1 laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	1 laporan	0

						yang Disusun				Umum			
2	1 1	3				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Meningkatnya Kualitas Air dan Udara		82%	348,141,632			369,251,881
2	1 1	3	2.0 1			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Nilai Kualitas Air, Udara dan Tanah		4/82	249,996,451			268,162,345
2	1 1	3	2.0 1	1		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Bima	10 titik	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 titik	21,200,000
2	1 1	3	2.0 1	2		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kota Bima	3 keluraha n	86,196,451	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 kelurah an	88,782,345
2	1 1	3	2.0 1	3		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas	Kota Bima	19 Titik	143,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	19 Titik	158,180,000

						Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan						
2	1 1	3	2.0 2		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Bentuk Media (sarana) Penyampaian Informasi	82%		68,145,181			70,189,536
2	1 1	3	2.0 2	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Kota Bima	5 Lokasi	38,145,181	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Lokasi	39,289,536
2	1 1	3	2.0 2	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Kota Bima	5 kali	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 kali	30,900,000
2	1 1	3	2.0 3		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah aturan dan Pedoman Dalam Melindungi Kelestarian Lingkungan			30,000,000			30,900,000

2	1 1	3	2.0 3	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Kota Bima	4 kali	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 kali	30,900,000
2	1 1	3	2.0 3	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Bima	3 Lokasi	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Lokasi	0
2	1 1	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		11,34%	3,453,862,792			3,557,147,454
2	1 1	4	2.0 1		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luas RTH Publik Yang tertangani			3,453,862,792			3,453,862,792
2	1 1	4	2.0 1	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang	Kota Bima	3 Dokumen	14,396,137	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	3 Dokumen	14,396,137

						Disusun				Umum		
2	1 1	4	2.0 1	2	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	24 taman	63,236,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 taman	65,234,000
2	1 1	4	2.0 1	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	34 taman	3,376,230,405	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	34 tama n	3,477,517,317
2	1 1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Meningkatnya Jumlah Izin yang diawasi		60%	40,000,000			40,120,000
2	1 1	6	2.0 1		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ijin yang di terbitkan		300 ijin	40,000,000			40,120,000
2	1 1	6	2.0 1	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang	Kota Bima	500 izin	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	500 izin	40,120,000

						Diberikan							
2	1 1	8				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase meningkatnya Jumlah Pokmas sadar Lingkungan	100		140,750,000			144,000,000
2	1 1	8	2.0 1			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidkan dan pelatihan yang dilaksanakan	1 kali		140,750,000			144,000,000
2	1 1	8	2.0 1	1		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Instansi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Kota Bima	3 kelompok	140,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	500 izin	144,000,000
2	1 1	9				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Meningkatnya Penghargaan di bidang Lingkungan hidup	Kota Bima	100	36,610,793	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36,610,793
2	1 1	9	2.0 1			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga masyarakat dapat penghargaan dalam kegiatan lingkungan hidup		3 Kelompok	36,610,793			37,709,116

2	1	9	2.0	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kota Bima	3 ha	36,610,793	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Lembaga	37,709,116
2	1	1	0		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Menurunnya Pelanggaran Terhadap RPPLH			14,467,285			14,967,285
2	1	1	0	2.0	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat yang diselesaikan			14,467,285			14,967,285
2	1	1	0	2.0	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Kota Bima	20 Pengaduan	14,467,285	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Pengaduan	14,967,285
2	1	1	1		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Pengolahan Sampah	70%		3,646,183,500			3,755,569,005
2	1	1	1	2.0	Pengelolaan Sampah				3,646,183,500			3,755,569,005
2	1	1	1	2.0	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan,	Jumlah Sampah	Kota	228 ton	3,480,990,500	Dana	228 ton	3,585,420,215

					Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Bima			Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2	1 1	1 1	2.0 1	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kota Bima	3 pokmas	110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 pokmas	113,300,000
2	1 1	1 1	2.0 1	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk	Kota Bima	10 kali	55,193,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		56,848,790

						Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada									
								TOTAL	19,254,164,989						19,526,499,573

BAB V

PENUTUP

Dengan selesainya penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup DLH Kota Bima tahun 2022 mendatang, dapat mencapai hasil yang optimal dan efisien.

Dalam mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima yakni ***“Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup”*** Maka kematangan Rencana Strategis 2018-2023 yang tertuang dalam Rencana Kerja tahunan adalah Pedoman kerja untuk tahun 2022.

Akhirnya kepada Tuhan jualah kita berserah diri seraya memohon bimbingannya semoga apa yang direncanakan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa dan Negara, Amin.

Kota Bima, Maret 2022

Kepala Dinas,

Syarief Rustaman, S.Sos., M. Ap

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19730409 199211 1 001